



BANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN

Wawali Dorong Hasil Kinerja Berdampak Nyata

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya tidak akan berhenti dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini guna mewujudkan hasil kinerja pemerintahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Walikota (Wawali) Yogya Wawan Harmawan, mendorong agar pengawasan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi tetapi juga menitikberatkan pada kualitas hasil, pencegahan, serta dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Ia menilai selama ini masih terdapat ego sektoral yang cukup kuat di lingkungan perangkat daerah, sehingga menghambat sinergi dan efektivitas program. "Ke depan, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Yogya harus dibangun dengan semangat kolaborasi, melebur, dan saling terbuka. Kalau egonya masih tinggi, hasilnya tidak akan maksimal," urainya, Senin (22/12).

Wawan menilai, pengawasan dan perencanaan tidak cukup hanya memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga harus mampu menjawab kualitas dan manfaat dari setiap program. Ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar kuantitas kegiatan menuju kualitas output yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Secara laporan bisa saja semuanya baik, tidak ada temuan. Tapi kalau dampaknya tidak terasa, itu perlu kita evaluasi bersama.

Yang kita kejar adalah kualitas," imbuhnya.

Dirinya juga mendorong agar penganggaran daerah lebih fokus pada kegiatan yang penting dan berdampak besar, serta berani mengeliminasi program-program kecil yang tidak memberikan nilai tambah. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan intervensi terhadap perangkat daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran, serta menempatkan transparansi dan keterbukaan sebagai prinsip utama. "Saya pastikan semua proses harus transparan dan terbuka. Tidak ada intervensi, tidak ada titipan. Kalau ada yang mengatasnamakan saya, silahkan laporkan," tegasnya.

Oleh karena itu peran Inspektorat juga perlu diperkuat dalam aspek pencegahan, sehingga potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara Pemkot Yogya, Pemda DIY, dan Keraton Yogyakarta agar kebijakan dan program berjalan selaras. Ia juga mengajak seluruh jajaran OPD untuk bersama-sama menata Kota Yogya dengan semangat inovasi, integritas, dan tanggung jawab. Dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, dirinya optimis Pemkot mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara Inspektur Inspektorat Kota Yogya Fitri Paulina Andriani, menjelaskan pihaknya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam

mendukung walikota melalui fungsi audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, hingga layanan konsultasi. "Inspektorat hadir bukan semata-mata sebagai pengawas, tetapi sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan," katanya.

Jajarannya pun telah melakukan pengawasan semester II tahun 2025 mulai dari audit operasional, audit kinerja, audit probity, hingga pengawasan tematik dan investigatif. Hasil pengawasan masih menemukan sejumlah catatan, antara lain terkait pengelolaan belanja, administrasi aset, pengukuran kinerja, serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Temuan-temuan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi perangkat daerah. Seluruh temuan dan rekomendasi pengawasan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Inspektorat juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyediakan layanan klinik konsultasi bagi perangkat daerah untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang. "Kami ingin menegaskan bahwa pengawasan tidak dimaknai sebagai upaya mencari kekeliruan, melainkan sebagai instrumen perbaikan tata kelola. Karena itu, Inspektorat juga melakukan pemantauan tindak lanjut agar perangkat daerah dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat," ujarnya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005